



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAMSURIJAL
2. Jabatan : PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
3. NHK : 422725

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 110.000.000

1. MOTOR, HONDA NF 100 TD Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp.
2.000.000
2. MOTOR, HONDA NF 11B1D M/T Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
2.000.000
3. MOTOR, HONDA NF11T11C01 M/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI
Rp. 6.000.000
4. MOBIL, SUZUKI GX Tahun 2020, LAINNYA Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 21.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 9.438.644

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.140.438.644

III. HUTANG Rp. 648.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 492.438.644

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.